

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap praktik manajemen laba riil pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Manajemen laba riil diukur menggunakan model Roychowdhury (2006), sedangkan koneksi politik diidentifikasi melalui keterkaitan dewan direksi, komisaris, dan kepemilikan perusahaan dengan aktor politik atau pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian empiris, penelitian ini menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan manipulasi aktivitas riil dibandingkan perusahaan tanpa koneksi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa koneksi politik dalam konteks Indonesia berfungsi sebagai mekanisme disiplin yang membatasi perilaku oportunistik manajemen, sejalan dengan *political cost hypothesis*.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan seperti ukuran dan usia perusahaan berbeda secara signifikan antara perusahaan berkoneksi politik dan tidak berkoneksi politik, yang menandakan bahwa perusahaan besar dan lebih mapan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjalin hubungan politik. Namun demikian, tidak semua variabel keuangan menunjukkan perbedaan atau pengaruh yang signifikan, yang mengindikasikan

bahwa praktik manajemen laba riil dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal perusahaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa koneksi politik tidak selalu berdampak negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sebaliknya, dalam konteks pasar modal Indonesia, koneksi politik justru dapat berperan dalam menekan praktik manajemen laba riil dan mendorong perilaku pelaporan keuangan yang lebih konservatif.

5.2 Keterbatasan

Meskipun penelitian ini telah disusun dan dianalisis secara sistematis, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Pertama, pengukuran manajemen laba riil dalam penelitian ini hanya menggunakan model (Roychowdhury, 2006). Model ini memiliki keterbatasan karena hanya menangkap manipulasi melalui aktivitas operasional tertentu dan belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh bentuk praktik manajemen laba riil yang mungkin dilakukan perusahaan.

Kedua, pengukuran koneksi politik dalam penelitian ini bersifat dikotomis (*dummy*), sehingga belum mampu menangkap tingkat kekuatan, intensitas, maupun jenis koneksi politik secara lebih mendalam. Perbedaan pengaruh antara koneksi politik langsung dan tidak langsung belum dapat diidentifikasi secara rinci.

Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan non-keuangan di Indonesia dalam periode tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum tentu

dapat digeneralisasi pada sektor keuangan atau pada negara dengan karakteristik institusional dan politik yang berbeda.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, beberapa saran dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak terkait.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan pengukuran manajemen laba, seperti mengombinasikan manajemen laba riil dan manajemen laba akrual, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku manajemen laba perusahaan. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan pengukuran koneksi politik dengan mempertimbangkan intensitas atau jenis koneksi politik yang dimiliki perusahaan.

Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas periode pengamatan atau membandingkan lintas negara untuk melihat apakah peran koneksi politik terhadap manajemen laba riil bersifat konsisten dalam berbagai konteks kelembagaan dan sistem tata kelola.

Bagi regulator dan otoritas pasar modal, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi terhadap perusahaan yang memiliki eksposur politik. peningkatan kualitas pengawasan dan tata kelola perusahaan dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan praktik manajemen laba yang berpotensi merugikan pemangku kepentingan.

Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan politik membawa konsekuensi reputasi dan pengawasan yang lebih

besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan praktik pelaporan keuangan yang lebih transparan dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Bagi investor, temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai kualitas laba dan risiko pelaporan keuangan perusahaan, khususnya dengan memperhatikan karakteristik koneksi politik dan struktur tata kelola perusahaan.